

BAB II

SEJARAH UNI EROPA, INSTITUSI DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Uni Eropa, pada bagian awal membahas sejarah Uni Eropa beserta para anggotanya serta sarana dan prasarananya, kemudian dilanjutkan dengan membahas institusi – institusi yang ada di dalam Uni Eropa, di bagian akhir penulis akan membahas kebijakan – kebijakan Uni Eropa yang terkait dengan kebijakan luar negerinya.

A. Sejarah Uni Eropa

Sejarah merupakan salah satu hal yang penting untuk mengetahui tentang Uni Eropa, Uni Eropa merupakan sebuah organisasi supranasional yang menaungi negara-negara yang ada di benua eropa yang telah menjadi anggota Uni Eropa. Uni Eropa merupakan kesatuan ekonomi dan politik yang memiliki 28 negara didalamnya.

Terdapat beberapa tahap dalam pembentukan Uni Eropa, penggagasnya adalah Robert Schuman yaitu seorang menteri luar negeri Perancis bersama kelima negara anggota penggagas Uni Eropa. Diawali dengan pembentukan European Coal and Steel Community (ECSC) pada tahun 1952, awalnya intergrasi di laksanakan di keenam negara penggagas Uni Eropa yaitu Belgium, Prancis, Jerman, Italia, Luxembourg dan Belanda.

ECSC adalah komunitas negara-negara The Inner Six yang bertujuan menghapus berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan pasar bersama tempat produk, pekerja, dan modal dari sektor batubara dan baja dari negara-negara anggota bisa bergerak dengan bebas. Pada tanggal 9 Mei 1950 (Europe Day), Robert Schuman (Menlu Perancis) mempresentasikan idenya dalam misi penyelamatan Eropa sehingga terbentuk European Coal and Steel Community (ECSC). ECSC akhirnya ditandatangani pada Traktat Paris (18 April 1951) oleh 6 negara pionir yang juga merupakan anggota Council of Europe. ECSC resmi dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1952 s/d tahun 2002. Dalam pelaksanaannya ECSC terbukti ampuh menjaga

“keharmonisan” Eropa selama hampir setengah abad. (Nugraha, 2012)

Setelah terbentuk ECSC, dibentuklah European Economic Community dan European Atomic Community (EUROATOM). Pada tahun 1957 enam anggota pendiri memutuskan untuk membuat Komunitas Atom Eropa untuk penelitian dalam pemanfaatan energi nuklir dan pemanfaatan damai lainnya serta komunitas ekonomi yang dibangun di sekitar gerakan bebas pekerja, barang dan jasa. Bea cukai atas barang-barang manufaktur dihapuskan dan kebijakan umum terutama dalam kebijakan pertanian dan kebijakan perdagangan luar negeri harus ditetapkan.

Dalam hal membantu kerjasama ekonomi, menghasilkan European Economic Community (EEC) pada tahun 1958, negara yang bergabung yaitu berjumlah enam negara, Belgium, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg dan Belanda.

Berdirinya EEC atas dasar Traktat Roma (Treaty of Rome) yang kemudian mulai berlaku sejak tanggal satu Januari 1958. Traktat Roma dengan jelas mempertegas orientasi kerjasama EEC di kawasan. Organisasi tersebut juga masih di pelopori oleh keenam negara di atas. Pada wadah EEC mulai terlihat adanya kesadaran dari keenam negara anggota tersebut dimana masalah perekonomian juga ternyata sangat penting untuk dibicarakan bersama. EEC kala itu sudah memberlakukan beberapa hal yang telah menjadi tradisi dan kini telah di modifikasi di dalam Uni Eropa, yaitu;

1. Mengadakan peraturan bea ekspor, impor ringan di antara negara – negara anggota
2. Memudahkan prosedur, peraturan penanaman modal asing (Foreign Direct Investment) di negara – negara anggota
3. Membuka lingkungan yang luas bagi warga negara anggota untuk bekerja di wilayah negara anggota lainnya, dan
4. Melancarkan proyek bersama dalam bidang perekonomian (SamUni Eropal, 2017).

Terkait dengan kebijakan pasar bebas yang diwujudkan dalam EEC, maka tujuan dibentuknya EAEC/Euratom juga terkait dengan pergerakan bebas sumber produksi, distribusi, dan

riset yang diperlukan untuk pengembangan sumber energi yang berbasis kepada penggunaan nuklir antar sesama negara anggota. EEC dan EAEC (Euratom) resmi diberlakukan pada tahun 1958.

ESCS, EEC dan Euratom resmi disatukan (merger) menjadi European Community (EC) atau Masyarakat Eropa pada bulan Juli 1967. Kerjasama ekonomi yang disepakati pada EEC segera diterapkan, sehingga pada tahun 1968 semua tarif yang ada antar negara-negara anggota dihilangkan sepenuhnya. (Nugraha, 2012)

Dalam Traktat Maastrich (*Maastrich Treaty*) isinya adalah berdirinya Uni Eropa yang sebelumnya bernama EC yang pada awalnya berkomitmen atau sepakat untuk membicarakan masalah ekonomi di kawasan. Traktat Maastrich ditandatangani secara resmi pada tanggal tujuh Februari 1992, dan mulai berlaku pada tanggal satu November 1993. (Samuel, 2017)

Kemudian European Community mengalami *First Enlargement* pada tahun 1973. Keberhasilan enam anggota pendiri membuat Denmark, Irlandia, dan Inggris Raya untuk mengajukan keanggotaan ke Komunitas Eropa. Mereka akhirnya diterima pada tahun 1972 setelah perundingan yang sulit di mana Perancis, di bawah Presiden de Gaulle menggunakan hak vetonya dua kali, sekali pada tahun 1961 dan lagi pada tahun 1967. Pembesaran pertama ini, yang meningkatkan jumlah Negara Anggota dari enam menjadi sembilan pada tahun 1973, tugasnya adalah terhubung dengan tugas-tugas Komunitas; diberikan tanggung jawab untuk masalah-masalah sosial, regional dan lingkungan.

Dilanjutkan dengan pembentukan Sistem Moneter Eropa atau *European Monetary System* pada tahun 1979. Kebutuhan untuk konvergensi ekonomi dan penyatuan moneter menjadi jelas pada awal tahun 1970 ketika Amerika Serikat menanggukkan konvertibilitas dolar. Ini menandai dimulainya periode ketidakstabilan moneter dunia diperparah oleh dua krisis minyak tahun 1973 dan 1979. Pembentukan Sistem Moneter Eropa pada tahun 1979 membantu menstabilkan nilai tukar dan mendorong Negara-negara Anggota untuk mengejar kebijakan ekonomi yang ketat yang memungkinkan mereka untuk saling

memberikan dukungan timbal balik dan manfaat dari disiplin yang dikenakan oleh area ekonomi terbuka.

Setelah pembetukan sistem moneter Eropa terjadi *Second Enlargment* pada 1981 kemudian *Third Enlargment* pada 1986. Komunitas diperluas ke selatan dengan aksesi Yunani pada tahun 1981 dan Spanyol serta Portugal pada tahun 1986, setelah negara-negara ini menyingkirkan kediktatoran mereka dan berubah menjadi sistem demokrasi. Pada 1970-an dan 1980-an, Komunitas Eropa mulai memainkan peran yang lebih penting secara internasional, menandatangani perjanjian baru dengan negara-negara di Mediterania Selatan serta di Afrika, Karibia dan Pasifik, yang terkait dengan Komunitas oleh empat Lomé berturut-turut. Konvensi (1975, 1979, 1984 dan 1989), dinamai ibukota Togo di Afrika. Dengan perjanjian yang ditandatangani di Marrakech pada April 1994 di antara semua anggota GATT dan mengarah ke fondasi WTO, perdagangan dunia memulai fase baru perkembangannya. Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar dunia menjadi sadar bahwa bekerja di profil yang lebih tinggi di panggung internasional harus mendorong tujuan untuk menemukan kebijakan asing dan keamanan umum di panggung internasional sebagai satu suara dan wajah Eropa.

Dilanjutkan dengan Single Act pada 1986. Pada awal 1980-an resesi dunia dan perselisihan internal pada distribusi beban keuangan mengarah ke tahap "Europessimism". Ini memberi jalan dari tahun 1985 dan seterusnya ke pandangan yang lebih berharap tentang prospek untuk merevitalisasi Komunitas: Atas dasar Buku Putih yang disusun pada tahun 1985 oleh Komisi yang dipimpin oleh Jacques Delors, Komunitas menetapkan sendiri tugas menciptakan satu pasar pada 1 Januari 1993. The Single Act, ditandatangani pada Februari 1986 dan berlaku sejak Juli 1987, mengkonfirmasi target ambisius ini dan memperkenalkan prosedur baru untuk mengadopsi undang-undang terkait, yaitu penghapusan hak veto negara-negara anggota dalam pertanyaan kebijakan pasar internal dan pengenalan apa yang disebut "mayoritas yang memenuhi syarat" (dengan suara proporsional, tetapi tidak

dengan cara linear, ke populasi negara-negara anggota). Ini mulai berlaku pada 1 Juli 1987.

Maastricht Treaty pada tahun 1991. Runtuhnya Tembok Berlin, diikuti oleh penyatuan Jerman pada 3 Oktober 1990, yaitu pembebasan dari kontrol Soviet dan demokratisasi berikutnya dari negara-negara Eropa Tengah dan Timur serta disintegrasi Uni Soviet pada bulan Desember 1991, mengubah politik struktur Eropa. Negara-negara Anggota bertekad untuk memperkuat hubungan mereka dan merundingkan sebuah Perjanjian baru, fitur-fitur utama yang disepakati di Dewan Eropa Maastricht pada bulan Desember 1991. Perjanjian tentang Uni Eropa, yang mulai berlaku pada November 1993, menetapkan Negara-negara Anggota yang ambisius. program: • serikat moneter pada tahun 1999, • kebijakan umum yang baru, • kewarganegaraan Eropa, • kebijakan luar negeri dan keamanan umum • dan keamanan internal.

Pembesaran keempat atau *Fourth Enlargment* pada tahun 1995. Pada tanggal 1 Januari 1995, tiga negara lainnya bergabung dengan Uni Eropa. Austria, Finlandia, dan Swedia memperluas Uni dengan karakter khusus mereka dan membuka dimensi lebih lanjut di jantung Eropa tengah dan utara. Union of Fifteen sekarang menghadapi dua tantangan utama: • sukses dalam perluasan untuk memasukkan sepuluh negara di Eropa tengah dan timur, Malta dan Siprus • penggunaan dinamika serikat moneter yang, berdasarkan penciptaan Euro pada 2 Mei 1998, harus memberikan ekonomi Negara-negara Anggota dengan konvergensi yang lebih baik dan kondisi untuk pertumbuhan pekerjaan yang permanen.

Perjanjian Amsterdam pada tahun 1997, menerapkan klausul peninjauan kembali dalam Perjanjian Maastricht, Negara-negara Anggota menegosiasikan perjanjian lebih lanjut, ditandatangani di Amsterdam pada Oktober 1997 (yang berlaku sejak Mei 1999) yang mengadaptasi dan memperkuat kebijakan dan kekuatan Perhimpunan, khususnya dalam kerja sama peradilan, pergerakan bebas orang, kebijakan luar negeri dan kesehatan masyarakat. Parlemen Eropa, suara demokrasi

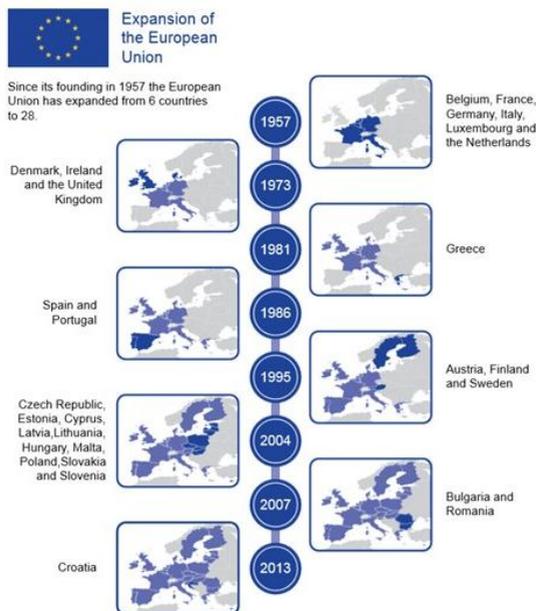
langsung Union, diberikan kekuasaan tambahan, yang menegaskan perannya sebagai legislator bersama.

Nice Treaty pada tahun 2000. Perjanjian ini telah diuraikan pada bulan Desember 2000, ditandatangani pada bulan Februari 2001 dan mulai berlaku pada bulan Februari 2003. Pencapaian utamanya adalah adaptasi institusional ke depan, perluasan yang akan datang dari 10 negara anggota baru. Salah satu hasil Pertemuan Puncak Nice adalah adopsi dengan suara bulat dari Piagam Eropa tentang Hak Fundamental, lebih dari 50 artikel yang berisi kompilasi kebebasan pribadi, hak ekonomi dan sosial dalam tradisi keseluruhan hukum Eropa.

Pembesaran kelima atau *Fifth Enlargement* pada tahun 2004. Sejak 1 Mei 2004, Uni Eropa terdiri dari 25 Negara Anggota. Yang baru adalah tiga republik Baltik Estonia, Latvia dan Lithuania, kemudian Polandia, Republik Ceko dan Slovakia, Hongaria, Slovenia sebagai bagian dari bekas Yugoslavia serta Siprus dan Malta. Untuk bagian Turki Siprus Utara harus ada beberapa pekerjaan transisional, karena bagian Selatan Yunani telah menolak proposal PBB untuk penyatuan kembali pulau itu, sementara Korea Utara telah menyetujui rencana tersebut. (Georgia, 1990)

Konstitusi Uni Eropa (diadopsi pada 18 Juni 2004) Setelah fase elaborasi dalam konferensi khusus, yang disebut Konvensi, dengan anggota Parlemen Eropa dan Negara Anggota serta Komisi UNI EROPA dan partisipasi Negara-negara Anggota, di bawah kepemimpinan mantan Presiden Prancis Valéry Giscard d'Estaing pada tahun 2002 dan 2003, pemerintah Uni Eropa tidak segera menyetujui rancangan Konstitusi untuk Uni Eropa yang harus menyediakan waktu yang lebih lama untuk kerangka hukum. Setelah diskusi antara Desember 2003 dan Juni 2004 selama sesi Dewan Eropa di Dublin / Irlandia Konstitusi Uni Eropa diadopsi oleh Kepala Negara dan Pemerintahan. Dengan Konstitusi ini, yang mengandung juga Piagam Hak Fundamental Uni Eropa, diharapkan bahwa selama beberapa tahun sekarang UNI EROPA dapat diperintah. Ini akan diratifikasi pada tahun-tahun mendatang dan akan berkuasa di tahun 2007.

Kebijakan dan administrasi Uni Eropa berarti keseimbangan konstan antara kepentingan nasional dan umum, menghormati keragaman tradisi nasional dan menempe identitas yang terpisah. Mereka telah dikonfirmasi secara positif oleh fakta bahwa • ada satu pasar dengan sirkulasi bebas untuk barang, jasa, modal dan orang - dengan lebih banyak orang daripada Amerika Serikat dan Rusia bersama-sama • ada ruang umum tanpa visa dan kontrol perbatasan (dengan beberapa pengecualian) di dalam UNI EROPA • ada mata uang umum untuk Uni Eropa (dengan beberapa pengecualian), Euro • Uni Eropa 6 negara dari 1952/1957 telah secara permanen berkembang menjadi 25 negara Uni Eropa pada tahun 2004 - dengan lebih banyak kandidat negara yang bekerja untuk akses.



Sumber http://www.parliament.scot/ResearchBriefingsAndFactsheets/S5/SB_1637_The_European_Union_A_Brief_History.pdf

Uni Eropa mempunyai luas wilayah yakni 4.324.782 kilometer persegi mulai dari Irlandia di bagian barat, lalu Finlandia di bagian Utara, kemudian Siprus di bagian selatan, dan Romania, Bulgaria di bagian timur. Negara anggota Uni Eropa dengan luas wilayah yang paling besar adalah Swedia sedangkan negara dengan luas wilayah yang paling kecil yaitu Malta. Tingkat pertumbuhan penduduknya berdasarkan tahun 2008 adalah 1,5%. Uni Eropa juga mempunyai bendera dan lagu kebangsaan sendiri. Bendera Uni Eropa dilambangkan dengan 12 bintang yang mengelilingi atau melingkari warna dasar biru bendera tersebut. Lagu kebangsaannya adalah *Ode an die Freude*.

Uni Eropa berpusat di kota Brussels, Belgia sebagai ibu kotanya. Jumlah penduduk Uni Eropa sampai 1 Januari 2010 mencapai 501,1 juta. Satu tahun sebelumnya 499,7 juta, dengan 900.000 imigran masuk blok itu dan penambahan alamiah 500.000 (Joewono, 2010). Jumlah tenaga kerja Uni Eropa sebesar 222,7 juta jiwa. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jerman dengan jumlah penduduk sekitar 82.400.000 penduduk. Uni Eropa juga mempunyai sumber daya alam berupa biji besi, gas alam, minyak, batu bara, tembaga, timbal, seng, bauksit, uranium, potas, garam, tenaga air, kayu, dan ikan. Uni Eropa juga mempunyai barang – barang komoditas ekspor dan impor. Barang – barang komoditas ekspor diantaranya adalah mesin dan peralatannya, kendaraan bermotor, pesawat terbang, plastik, obat-obatan dan kimia lain, bahan bakar, besi dan baja, metal non-besi, bubur kayu dan kertas, tekstil, daging, susu dan diversifikasi produknya, ikan, dan minuman beralkohol. Sementara barang – barang komoditas impornya adalah perkakas mesin, kendaraan bermotor, pesawat terbang. (Samuel, 2017)

B. Institusi – Institusi di Uni Eropa

Dalam organisasi tentu mempunyai unsur-unsur pelengkap organisasi yaitu dalam hal ini adalah institusi – institusi yang ada di dalamnya, dalam sub bab ini akan menjelaskan institusi –

institusi yang ada di Uni Eropa beserta dengan mekanisme pengambilan kebijakan dalam organisasi internasional Uni Eropa.

1. Komisi Eropa

Komisi Eropa atau yang dikenal The European Commission adalah badan eksekutif yang secara politik independen dari Uni Eropa. Hanya bertanggung jawab untuk menyusun proposal untuk undang-undang Eropa yang baru, dan menerapkan keputusan Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Berikut merupakan tugas dari Komisi Eropa :

a. Mengusulkan undang-undang baru

Komisi adalah satu-satunya undang-undang lembaga Uni Eropa yang diadopsi oleh Parlemen dan Dewan bahwa:

- 1) melindungi kepentingan Uni Eropa dan warganya mengenai isu-isu yang tidak dapat ditangani secara efektif di tingkat nasional;
- 2) dapatkan rincian teknis yang benar dengan berkonsultasi dengan para ahli dan masyarakat.

b. Mengelola kebijakan Uni Eropa & mengalokasikan pendanaan Uni Eropa

- 1) Menetapkan prioritas pengeluaran Uni Eropa, bersama dengan Dewan dan Parlemen.
- 2) Menarik anggaran tahunan untuk disetujui oleh Parlemen dan Dewan.
- 3) Mengawasi bagaimana uang dibelanjakan, di bawah pengawasan oleh Pengadilan Auditor .

c. Menegakkan hukum Uni Eropa

- 1) Bersama dengan Pengadilan, memastikan bahwa hukum Uni Eropa diterapkan dengan benar di semua negara anggota.

d. Mewakili Uni Eropa secara internasional

- 1) Berbicara atas nama semua negara Uni Eropa dalam badan internasional, khususnya di bidang kebijakan perdagangan dan bantuan kemanusiaan.
- 2) Merundingkan perjanjian internasional untuk Uni Eropa.

Berikut komposisi yang ada di Uni Eropa serta bagaimana proses pengambilan kebijakan : Kepemimpinan politik disediakan oleh tim 28 Komisaris (satu dari masing-masing negara Uni Eropa) - yang dipimpin oleh Presiden Komisi , yang memutuskan siapa yang bertanggung jawab untuk bidang kebijakan mana.

College of Commissioner, termasuk Presiden Komisi, tujuh Wakil Presiden, termasuk Wakil Presiden Pertama, dan Perwakilan Tinggi dari Uni untuk Kebijakan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan dan 20 Komisaris yang bertanggung jawab atas portofolio.

Menjalankan bisnis Komisi sehari-hari dilakukan oleh stafnya (pengacara, ekonom, dll.), Diorganisasi ke dalam departemen yang dikenal sebagai Direktorat Jenderal (Dirjen) , masing-masing bertanggung jawab untuk bidang kebijakan tertentu.

Proses Pemilihan Presiden, kandidat tersebut diajukan oleh para pemimpin nasional di Dewan Eropa, dengan mempertimbangkan hasil pemilihan Parlemen Eropa. Dia membutuhkan dukungan dari mayoritas anggota Parlemen Eropa untuk dipilih.

Proses memilih Tim, kandidat Presiden memilih Wakil Presiden dan Komisaris potensial berdasarkan saran dari negara-negara Uni Eropa. Daftar nominasi harus disetujui oleh para pemimpin nasional di Dewan Eropa.

Setiap nominasi muncul di hadapan Parlemen Eropa untuk menjelaskan visi mereka dan menjawab pertanyaan. Parlemen kemudian memilih apakah akan menerima nominasi sebagai tim. Akhirnya, mereka

ditunjuk oleh Dewan Eropa, oleh mayoritas yang memenuhi syarat. Masa jabatan Komisi saat ini berjalan hingga 31 Oktober 2019.

Berikut proses pengambilan keputusan di Komisi Eropa

:

1) Perencanaan strategis

Presiden mendefinisikan arah kebijakan untuk Komisi, yang memungkinkan Komisaris bersamasama memutuskan tujuan strategis, dan menghasilkan program kerja tahunan

2) Pengambilan keputusan kolektif

Keputusan diambil berdasarkan tanggung jawab bersama. Semua Komisaris setara dalam proses pengambilan keputusan dan sama-sama bertanggung jawab atas keputusan ini. Mereka tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan individual, kecuali ketika diizinkan dalam situasi tertentu.

Wakil Presiden bertindak atas nama Presiden dan mengoordinasikan pekerjaan di bidang tanggung jawab mereka, bersama dengan beberapa Komisaris. Proyek prioritas didefinisikan untuk membantu memastikan bahwa Kolese bekerja bersama secara dekat dan fleksibel.

Komisaris mendukung Wakil Presiden dalam mengajukan proposal ke Kolese. Secara umum, keputusan dibuat dengan konsensus, tetapi suara juga dapat terjadi. Dalam hal ini, keputusan diambil oleh mayoritas sederhana, di mana setiap Komisaris memiliki satu suara.

Direktorat Jenderal yang relevan (dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal, bertanggung jawab kepada Komisaris yang relevan) kemudian mengangkat subjek. Ini biasanya dilakukan dalam bentuk draft proposal legislatif

Ini kemudian diserahkan kembali kepada Komisaris untuk diadopsi pada pertemuan mingguan mereka, setelah mereka menjadi resmi, dan dikirim ke Dewan dan Parlemen untuk tahap berikutnya dalam proses legislatif Uni Eropa. (Union E. , European Union, 2018)

2. Dewan Uni Eropa

The Council of the European Union biasanya disebut dengan the Council of Ministers atau cukup the Council atau Dewan Uni Eropa. Dewan Uni Eropa adalah forum pertemuan para Menteri Negara-negara anggota Uni Eropa dan merupakan badan pengambil keputusan utama di Uni Eropa. Dewan Uni Eropa berlokasi di Brussels dan Luxembourg.

Dewan dapat mengambil keputusan melalui prosedur unanimity, dan dalam sektor-sektor di mana keputusan Parlemen dibutuhkan Dewan mengambil keputusan melalui *qualified majority*. Ada tiga pilihan voting, di antaranya (John McCormick, 1999, hal. 100):

Simple Majority, dapat dicapai jika setidaknya 15 anggota Dewan dari 28 negara anggota menyatakan mendukung. Dewan akan mengambil keputusan dengan simple majority dalam hal-hal prosedural, seperti penerapan aturan dan organisasi umum sekretariat, serta meminta Komisi untuk melakukan studi atau mengajukan proposal. (Council of the European Union, 2014)

Unanimity, Dewan harus memilih dengan suara bulat (*unanimity*) pada sejumlah hal-hal yang dianggap oleh negara-negara anggota bersifat sensitif, sebagai contoh:

- a. Kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan (dengan pengecualian dari kasus tertentu yang jelas memerlukan *qualified majority*, misalnya penunjukkan perwakilan khusus
- b. Kewarganegaraan (pemberian hak-hak yang baru bagi warga negara Uni Eropa)
- c. Keanggotaan Uni Eropa

- d. Keselarasan perundang-undangan nasional tentang perpajakan tidak langsung
- e. Keuangan Uni Eropa (sumber daya dan kerangka keuangan)
- f. Ketentuan-ketentuan di bidang keadilan dan *home affairs* (Jaksa Eropa, hukum keluarga, kerjasama operasional polisi)
- g. Keselarasan perundang-undangan nasional di bidang jaminan sosial dan perlindungan sosial

Selain itu, Dewan memilih dengan *unanimity* ketika Komisi tidak menyetujui amandemen dalam sebuah proposal. Aturan ini tidak berlaku *untuk* tindakan yang perlu diadopsi oleh Dewan misalnya, bertindak di bidang koordinasi ekonomi. Di dalam *unanimous voting*, abstain tidak mencegah keputusan yang telah diambil. (Council of the European Union, 2014)

Qualified Majority, adalah metode standar *voting* dan merupakan metode *voting* yang paling banyak *digunakan* oleh Dewan. *Qualified Majority* digunakan ketika Dewan mengambil keputusan dalam prosedur legislatif biasa, atau dikenal sebagai *co-decision*. Sekitar 80% dari semua undang-undang Uni Eropa diadopsi dari prosedur ini.

Pada tanggal 1 November 2014, terdapat prosedur baru dalam *Qualified Majority* yang berlaku di Dewan Uni Eropa. Dalam prosedur ini, apabila Dewan memberikan suara pada proposal dari Komisi atau *the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy*, *Qualified Majority* dapat dicapai jika memenuhi hal berikut:

- a. 55 % suara mendukung dari negara-negara anggota dalam praktiknya berarti 16 dari 28 negara anggota
- b. Proposal didukung oleh negara-negara anggota yang mewakili sekurang-kurangnya 65% dari total populasi Uni Eropa. (Council of the European Union, 2016)

3. Parlemen Eropa

The European Parliament atau Parlemen Eropa (PE) adalah lembaga legislatif yang mewakili warga Eropa dan mempunyai fungsi legislatif, *budget*, dan pengawasan eksekutif. Anggota Parlemen Eropa (*Members of the European Parliament/ MEPs*) dipilih langsung oleh warga negara Uni Eropa. Pemilihan diadakan setiap 5 tahun dan semua warga negara Uni Eropa di atas 18 tahun (16 tahun di Austria) sekitar 380 juta berhak untuk memilih wakil mereka di Parlemen. Saat ini Parlemen Eropa memiliki 751 anggota Parlemen dari 28 negara anggota. (European Commission Directorate-General for Communication Citizens Information, 2014)

Secara resmi, Parlemen Eropa berada di Strasbourg (Prancis), meskipun lembaga ini memiliki tiga tempat yakni Strasbourg, Brussels (Belgium) dan Luxembourg. Pertemuan utama Parlemen Eropa disebut sebagai ‘sidang pleno’, yang berlangsung 12 kali setiap tahun diadakan di Strasbourg, Prancis. Sementara itu, sidang pleno tambahan dan rapat komite diadakan Brussel. (European Commission Directorate-General for Communication Citizens Information, 2014) Presiden Parlemen Eropa saat ini Martin Schulz, setelah terpilih pada 17 Januari 2012. (European Parliament, 2012)

Parlemen Eropa memiliki tiga peran utama, yakni:

- a. Berbagi kekuatan dengan Dewan untuk membuat undang-undang dan meloloskannya. Hal itu bukti bahwa badan yang dipilih secara langsung akan menjamin legitimasi demokratis hukum Eropa (*The Power to Legislate*)
- b. Pengawasan yang demokratis terhadap lembaga-lembaga Uni Eropa, khususnya Komisi Eropa. Parlemen memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak calon Presiden Komisi dan Komisioner, serta memiliki hak untuk memeriksa Komisi secara keseluruhan (*The Power of Supervision*).

- c. Berbagi otoritas dengan Dewan atas anggaran Uni Eropa dan karena itu dapat mempengaruhi pengeluaran Uni Eropa. Di akhir prosedur anggaran, dapat mengadopsi atau menolak anggaran secara keseluruhan (The Power of Purse). (European Commission Directorate-General for Communication Citizens Information, 2014)

4. Mahkamah Eropa

Court of Justice of the European Union (CJEU) atau Mahkamah Eropa adalah lembaga yudikatif yang *berwenang* menyelesaikan berbagai konflik kepentingan internal Uni Eropa dan memberikan opini mengenai berbagai persetujuan internasional yang dilakukan oleh Uni Eropa. CJEU berdiri pada tahun 1952 yang berlokasi di Luxembourg. Secara umum, tugas CJEU adalah memastikan adanya pemahaman, interpretasi dan aplikasi yang sama dari negara-negara anggota Uni Eropa terhadap hukum Uni Eropa yang tertuang di dalam pasal 220 s/d 245 Traktat Masyarakat Eropa. (Mission of the Republic of Indonesia to the European Union in Brussels, 2003) Mahkamah memberikan putusan atas kasus yang paling umum terjadi, antara lain:

- a. Menafsirkan hukum (*Preliminary Rulings*), pengadilan nasional negara anggota Uni Eropa memerlukan kepastian akan hukum Uni Eropa yang diterapkan, hal ini karena pengadilan di setiap negara menafsirkan hukum secara berbeda. Jika pengadilan nasional merasa ragu tentang penafsiran atau keabsahan hukum Uni Eropa, dapat meminta Mahkamah Eropa untuk mengklarifikasi penafsiran hukum tersebut.
- b. Menegakkan hukum (*Infringement Proceedings*), jenis kasus yang diambil misalnya pemerintah nasional dianggap gagal mematuhi hukum Uni Eropa. Pengaduan dapat dimulai dari Komisi Eropa atau negara Uni Eropa lainnya. Jika negara ini ditemukan bermasalah, maka negara tersebut harus mematuhi hukum Uni Eropa, atau risiko jika terjadi kasus kedua kalinya dapat dikenakan denda.

- c. Membatalkan tindakan-tindakan hukum Uni Eropa (*Actions for Annulment*), jika tindakan Uni Eropa diyakini melanggar perjanjian Uni Eropa, Mahkamah Eropa dapat diminta untuk membatalkan tindakan itu melalui Pemerintah Uni Eropa, *The Council of European Union*, *The European Commission* untuk beberapa kasus, dan *European Parliament*.
- d. Memastikan Uni Eropa mengambil sebuah tindakan (*Actions for Failure to Act*), Parlemen, Dewan dan Komisi harus membuat keputusan tertentu dalam keadaan tertentu. Jika tidak, maka Pemerintah Uni Eropa dan lembaga Uni Eropa lainnya, dalam kondisi tertentu (individu atau perusahaan) bisa mengadu ke Mahkamah Eropa.
- e. Sanksi terhadap Lembaga Uni Eropa (*Actions for Damages*), setiap orang atau perusahaan yang telah merasa dirugikan sebagai akibat dari tindakan dari Uni Eropa atau staf Uni Eropa dapat mengambil tindakan melalui Mahkamah Eropa. (European Union, 1952)

5. Dewan Eropa

The European Council atau Dewan Eropa adalah forum pertemuan para Kepala Negara dan Pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa dan Presiden Komisi Eropa. Dewan Eropa berdiri secara forum informal pada tahun 1947, kemudian mendapatkan status formal pada tahun 1992 dan menjadi salah satu institusi Uni Eropa pada tahun 2009. Dewan Eropa berlokasi di Brussels (Belgium). Saat ini Dewan Eropa dipimpin oleh Presiden Donald Tusk (European Union, 2009)

Pasal 4 TEU (*The Treaty on European Union*) mensyaratkan Dewan untuk bersidang paling tidak 2 kali dalam setahun dibawah kepemimpinan *Kepala* Negara atau Pemerintah negara anggota yang sedang menjabat sebagai Presidensi Uni Eropa (berganti setiap 6 bulan). Pada praktiknya setiap Presidensi biasanya mengadakan 1 sidang formal dan 1 sidang informal Dewan Eropa. Dewan Eropa

sebagian besar mengambil keputusan berdasarkan konsensus. Namun sejumlah kasus, Dewan Eropa mengambil keputusan melalui *qualified majority* dan *unanimity*, tetapi hanya Kepala Negara yang dapat memilih. (European Union, 2009)

Dewan Eropa merupakan sebuah forum bagi pertukaran pendapat yang bebas dan informal di antara para pemimpin negara anggota. Informal dalam artian Dewan Eropa yakni tidak mengadopsi keputusan apapun yang secara hukum *formal* mengikat negara anggota. Setiap deklarasi yang dihasilkan mempunyai validitas politis, namun tidak mempunyai *legal validity*. Mereka hanya memberi dorongan, arahan, dan kadang kala memberi jalan keluar bagi masalah-masalah yang menemui jalan buntu ditingkat Dewan Uni Eropa. (Mission of the Republic of Indonesia to the European Union in Brussels, 2003)

C. Kebijakan – Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa

1. TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States)

TACIS adalah upaya khusus Komunitas Eropa untuk mendukung proses berkelanjutan reformasi ekonomi dan pembangunan di 11 negara bagian CIS dan Georgia. Ini adalah program bantuan terbesar di dunia dari jenisnya, dengan pendanaan awal pada 1991 dari ECU 400 juta, dan selanjutnya ECU 450 juta yang dilakukan pada tahun 1992. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masing-masing negara berkembang untuk membangun ekonomi pasar yang berfungsi secara efektif berdasarkan kepemilikan pribadi dan untuk mendorong perkembangan demokrasi pluralistik masyarakat. Pendanaan TACIS memberikan saran, pengetahuan dan pengalaman praktis. Dimana, efektivitas program dimaksimalkan dengan menggabungkan tindakan dalam berbagai sektor. Negara penerima terlibat erat dalam keputusan membuat dan mengelola program TACIS untuk negara mereka sendiri. Negara Penerima di

bawah program TACIS adalah 11 anggota yaitu : Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgystan, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. (Comission, 2018)

2. MEDA (Mesures D'Accompagnement)

MEDA adalah instrumen utama kerjasama ekonomi dan keuangan di bawah kemitraan Euro-Mediterrania. Diluncurkan pada tahun 1996 (MEDA I) dan diubah pada tahun 2000 (MEDA II). Ini memungkinkan Uni Eropa (UNI EROPA) memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada negara-negara di Mediterania selatan: Aljazair, Siprus, Mesir, Israel, Yordania, Lebanon, Malta, Maroko, Wilayah Palestina, Suriah, Tunisia, dan Turki. Program MEDA mengambil tempat dari berbagai protokol keuangan bilateral yang ada dengan negara-negara di cekungan Mediterania. Ini terinspirasi oleh program Phare dan TACIS, terutama mengenai transparansi dan informasi. Sebuah pos anggaran ditetapkan untuk membiayai program. Tindakan di bawah program MEDA bertujuan untuk memenuhi tujuan dari tiga sektor kemitraan Euro-Mediterrania:

- a. memperkuat stabilitas politik dan demokrasi;
- b. menciptakan kawasan perdagangan bebas Eropa-Mediterrania dan pengembangan kerjasama ekonomi dan sosial;
- c. memperhatikan dengan baik dimensi manusia dan budaya.

Program MEDA mendukung transisi ekonomi negara-negara non anggota Mediterania (MNC) dan pembentukan kawasan perdagangan bebas Eropa-Mediterrania dengan mempromosikan reformasi ekonomi dan sosial untuk modernisasi perusahaan dan pengembangan sektor swasta, membayar khusus perhatian untuk:

- a. dukungan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dan penciptaan lapangan kerja;
- b. pembukaan pasar;

- c. promosi investasi swasta, kerja sama industri dan perdagangan antar berbagai mitra;
- d. peningkatan infrastruktur ekonomi, termasuk sistem keuangan dan perpajakan;
- e. konsolidasi keseimbangan keuangan utama dan penciptaan lingkungan ekonomi yang mendukung pertumbuhan yang dipercepat (dukungan untuk penyesuaian struktural). (Law, 2007)

3. ENP (European Neighbourhood Policy)

European Neighbourhood Policy yang disingkat ENP adalah sebuah kebijakan dari Uni Eropa untuk mengatasi negara – negara yang berada di pinggiran negara eropa dalam rangka reformasi ekonomi dan perdagangan, kebijakan imigrasi, reformasi institusional, penelitian terpadu dan pendidikan tinggi untuk sebuah tujuan besar yaitu membuat lingkaran kestabilan, harmonis dan negara makmur di sekitar Uni Eropa. Kebijakan ini di buat pada tahun 2004 dengan isinya merupakan pembaharuan-pembaharuan kebijakan Uni Eropa yang sebelumnya terkait dengan negara pinggiran yang lebih populer disebut border country seperti kebijakan TACIS, MEDA, PHARE yang semuanya itu merupakan kebijakan Uni Eropa untuk negara-negara yang berada di sekitar Uni Eropa. (Edzard Wesselink, 2012). Kebijakan ini yang akan penulis paparkan lebih jauh di bab selanjutnya.